

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL: SINERGI DALAM PERBEDAAN

Izza Shoffa Nada ^{*1}
Qurroh A'yuni Achadi ²
Nurul Mubin ³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo, Indonesia
^{*}e-mail : Zafanaa18@gmail.com

Abstrak

Masyarakat multikultural adalah realitas sosial yang mencerminkan keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan nilai-nilai dalam suatu wilayah. Keberagaman ini dapat menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam membangun harmoni sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis melalui pendekatan sinergi dalam perbedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan analisis deskriptif untuk mengkaji konsep multikulturalisme, tantangan, dan peluangnya di berbagai konteks sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural, dialog antarbudaya, kebijakan inklusif, dan penguatan nilai toleransi menjadi elemen kunci dalam menciptakan sinergi di tengah perbedaan. Dalam konteks Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan ideologis yang relevan untuk mengelola keberagaman. Dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati identitas setiap kelompok, masyarakat multikultural dapat berkembang menjadi ruang sosial yang adil, toleran, dan penuh inovasi. Artikel ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik dalam membangun kohesi sosial di masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Masyarakat Multikultural, Sinergi, Keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika.

Abstract

Multicultural society is a social reality that reflects the diversity of culture, religion, ethnicity, language, and values in a region. This diversity can be both a wealth and a challenge in building social harmony. This article aims to analyze strategies in realizing a harmonious multicultural society through a synergy approach in differences. The research method used is a literature study with descriptive analysis to examine the concept of multiculturalism, its challenges, and opportunities in various social contexts. The results of the study indicate that multicultural education, intercultural dialogue, inclusive policies, and strengthening the value of tolerance are key elements in creating synergy amidst differences. In the context of Indonesia, the motto Bhinneka Tunggal Ika is a relevant ideological foundation for managing diversity. With an inclusive approach and respect for the identity of each group, a multicultural society can develop into a just, tolerant, and innovative social space. This article contributes to the development of theory and practice in building social cohesion in a multicultural society.

Keywords: Multicultural Society, Synergy, Diversity, Bhinneka Tunggal Ika.

PENDAHULUAN

Masyarakat multikultural merupakan realita sosial yang dihadapi oleh banyak negara di era globalisasi. Keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa menjadi ciri khas yang memperkaya suatu bangsa, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri. Perbedaan yang ada dapat menjadi potensi besar untuk membangun sinergi, asalkan dikelola dengan baik. Namun, tidak jarang perbedaan ini justru memicu konflik, prasangka, dan polarisasi sosial. Dalam konteks tersebut, mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis membutuhkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama antar kelompok. Pendekatan sinergi dalam perbedaan menekankan bagaimana keberagaman dapat dijadikan sebagai kekuatan kolektif yang saling melengkapi. Hal ini tidak hanya menguatkan kohesi sosial, tetapi juga menciptakan peluang untuk berkembang bersama di tengah dinamika masyarakat global.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi ketidakadilan dan diskriminasi dalam masyarakat antara lain: a) konflik budaya: keanekaragaman budaya dalam masyarakat multikultural dapat menyebabkan konflik antar nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan yang berbeda. Ketidakhormatan terhadap budaya lain dapat memicu ketegangan sosial dan kesalahpahaman antar kelompok.

b) ketidakadilan sosial: meskipun diharapkan ada penghargaan terhadap perbedaan dalam Masyarakat multikultural, seringkali menjadi ketidakadilan sosial. Mungkin ada kesenjangan ekonomi pendidikan dan akses sumber daya antar kelompok budaya yang berbeda.

c) tantangan integrasi: mengintegrasikan kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam satu masyarakat multicultural yang inklusif, ada kemungkinan ancaman terhadap identitas budaya khusus suatu kelompok. Ketika budaya tertentu mengalami asimilasi atau terabaikan, Masyarakat multicultural dapat kehilangan kekayaan dan keunikan dari kelompok tersebut. Dalam Setiap Masyarakat multikultural, penting untuk mengatasi keresahan keresahan ini dengan mengedepankan dialog antar kelompok, Pendidikan yang mempromosikan pemahaman dan penghargaan dalam perbedaan, serta kebijakan kebijakan yang memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warganya. Banyak negara di dunia saat ini memiliki populasi yang terdiri beragam kelompok etnis, budaya, agama, dan Bahasa. Kehadiran kelompok-kelompok ini menciptakan Masyarakat multicultural.

Migrasi dan globalisasi: migrasi manusia dan meningkatnya interaksi global telah menyebabkan pertemuan antara berbagai kelompok budaya (Santoso, Damayanti, et al, 2023:175-210). Perpindahan penduduk, baik akibat faktor ekonomi, politik, atau sosial, telah menghasilkan Masyarakat multicultural diberbagai dunia. Nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan; semakin banyak negara dan Masyarakat yang memahami pentingnya nilai kesetaraan, penghargaan, terhadap perbedaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat multicultural dianggap sebagai cara untuk mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap semua kelompok dalam Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi strategi dalam mewujudkan Masyarakat multicultural melalui sinergi dalam perbedaan. Metode ini melibatkan Langkah-langkah berikut:

- a. Studi literatur penelitian ini menganalisis berbagai sumber literatur akademik, artikel jurnal, buku, dan laporan resmi untuk memahami kerangka teoritis dalam menemukan praktik terbaik dalam membangun Masyarakat multicultural (Azra, 2007)
- b. Pengumpulan data primer
 - a. Data primer dikumpulkan melalui pendalaman yang mendalam mengenai jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu.
- c. Analisis data
Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan mengidentifikasi pola dan tema utama dari hasil pemahaman dan pengkajian. Kemudian membandingkan data dari literatur pemahaman dan kajian, dan memvalidasi data ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelebihan temuan (h.a.r. tilaar, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat multikultural adalah Masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, khas, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Koentjara Ningrat menjelaskan bahwa Masyarakat multicultural ditandai oleh adanya keragaman kebudayaan sebagai akibat proses sejarah, migrasi, atau kolonialisme. Dalam konteks Indonesia multikulturalisme menjadi bagian dari identitas bangsa yang mencerminkan semboyan *bhinneka tunggal ika*, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat multikultural memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari Masyarakat homogen. Ciri-

ciri ini mencakup aspek budaya, sosial, dan interaksi antar kelompok. berikut penjelasan rinci mengenai ciri-ciri Masyarakat multikultural:

3.1. Keberagaman etnis dan budaya

Masyarakat multicultural terdiri atas berbagai kelompok etnis dan budaya dengan tradisi, adat, dan norma yang berbeda. Setiap kelompok memiliki identitas budaya yang khas seperti Bahasa, pakaian tradisional, makanan khas, dan upacara adat. Keberagaman ini memperkaya budaya nasional tetapi juga memerlukan Upaya untuk menjaga harmoni diantara berbagai kelompok.

3.2. Keberagaman agama

Masyarakat multikultural biasanya memeluk berbagai agama dan kepercayaan. Setiap agama memiliki nilai dan ritual yang unik yang mempengaruhi kehidupan social Masyarakat. Perbedaan agama ini sering menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan toleransi dan dialog antar umat beragama.

3.3. Keragaman system nilai

Masyarakat multikultural memiliki berbagai system nilai yang mencerminkan pandangan hidup dan norma dari Setiap kelompok.

Adanya ruang untuk Pertukaran Budaya: Program-program yang mendorong pertukaran budaya dan interaksi antara kelompok budaya yang berbeda merupakan faktor pendukung dalam membangun masyarakat multicultural. Melalui pertukaran budaya, individu memiliki kesempatan untuk mempelajari, menghargai, dan merayakan perbedaan budaya (Santoso, Karim, et al., 2023). Kebijakan Publik yang Inklusif: Adanya kebijakan publik yang mendukung inklusivitas dan menghargai perbedaan budaya merupakan faktor pendukung dalam membangun masyarakat multikultural. Kebijakan-kebijakan ini melindungi hak-hak individu, mempromosikan kesetaraan, dan mengatasi ketidakadilan sosial yang mungkin timbul. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam membangun masyarakat multikultural sangat penting. Melalui keterlibatan dalam kegiatan komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan inisiatif lokal, individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan budaya dan membangun hubungan yang harmonis antar kelompok. Kesadaran Individu akan Nilai Multikultural: Kesadaran individu akan pentingnya menghargai perbedaan budaya dan nilai multikultural merupakan faktor pendukung yang penting. Ketika individu memiliki pemahaman yang kuat tentang manfaat keberagaman budaya dan kesediaan untuk belajar dari kelompok lain, mereka akan menjadi agen perubahan yang positif dalam membangun masyarakat multikultural.

Faktor-faktor pendukung ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan, mempromosikan inklusivitas, dan membangun masyarakat multikultural yang kuat. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia: Dalam masyarakat multikultural yang menghargai perbedaan, setiap individu memiliki hak asasi yang dihormati dan dilindungi tanpa memandang latar belakang budaya, etnis, atau agama mereka (Santoso, 2020a). Dampaknya adalah terciptanya lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua warga masyarakat. Peningkatan Toleransi dan Pemahaman Antarbudaya: Dengan menghargai perbedaan budaya, masyarakat menjadi lebih toleran dan memahami perspektif, kepercayaan, dan nilai-nilai kelompok budaya lain. Dampaknya adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan pengurangan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Kekayaan Budaya dan Kreativitas yang Bertambah: Dalam masyarakat multikultural, berbagai kebudayaan berkumpul dan saling berinteraksi, menciptakan kekayaan budaya yang lebih besar. Dampaknya adalah peningkatan variasi dalam seni, musik, tarian, bahasa, makanan, dan tradisi budaya lainnya. Masyarakat juga menjadi lebih kreatif dalam menciptakan inovasi dan pemecahan masalah melalui kolaborasi antar kelompok budaya. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Inklusi Sosial: Dalam masyarakat

multikultural yang inklusif, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dampaknya adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan inklusi sosial yang lebih luas, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Toleransi antar umat beragama hanya menjadi wacana yang digembor – gemborkan tanpa diimplementasikan dalam kehidupan sehari – hari. Multikulturalisme yang berprinsip pada pengakomodasian perbedaan yang hidup berdampingan dengan saling menghormati tanpa saling mengganggu menjadi angan – angan yang mungkin akan sulit untuk tercapai. Sebutan City of Tolerance pun menjadi ternoda hanya karena ulah sekelompok orang yang bertindak dengan mengatasnamakan agama tetapi jauh dari nilai – nilai kearifan agama yang justru imbasnya adalah mengancam multikulturalisme itu sendiri.

a) Konflik Beragama

Keberagaman beragama sebenarnya sudah ada sejak awal sejarah Indonesia. Baik itu saat bermacam – macam agama hidup secara berdampingan dengan damai maupun saat agama menjadi alasan konflik antara dua kelompok. Konflik agama dengan skala besar yang terjadi pasca reformasi 1998 masih membekas sebagai luka yang menganga lebar dan melukai multikulturalisme di Indonesia. Dan walaupun saat ini konflik dengan skala besar belum terjadi, bukan berarti potensi konflik hilang begitu saja. Konflik – konflik kecil seperti penyerangan rumah peribadatan di berbagai daerah bisa berubah skalanya menjadi besar jika negara tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Karena jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah bukan dengan tidak menghiraukan, menekan maupun berpura – pura konflik itu tidak ada tetapi yang penting adalah bagaimana konflik itu dipelajari, dianalisis dan dipahami penyebabnya sehingga dikemudian hari konflik dapat dideteksi sejak dini.

Dalam tataran politis, konflik ini bisa muncul karena adanya perebutan dalam wilayah akomodasi negara (Rahayu, 2011). Akomodasi merupakan sejumlah upaya negara untuk memfasilitasi praktik dan norma kelompok. Dalam artian yang lebih luas, akomodasi ini merupakan proses yang bekerja di banyak level dan wilayah yang berbeda yang tidak hanya melibatkan mereka yang bersentuhan langsung dengan keyakinan tertentu tetapi mereka yang juga diprediksi akan terkena imbasnya dikemudian hari. Pada dasarnya akomodasi ini hadir untuk menjamin setiap kelompok menjaga nilai dan norma yang mereka Yakini.

b) Klaim Individu dan Kelompok

Munculnya konflik agama di ruang publik sebenarnya didasarkan pada permasalahan yang cukup sederhana yaitu tidak adanya batasan yang jelas di masyarakat Indonesia antara mana yang termasuk dalam hak individu dan hak kelompok. Ketidapahaman antara hak individu dan hak kelompok inilah yang menyebabkan munculnya klaim – klaim kafir, kelompok agama berbeda adalah menyimpang dll. Subjek hak yang paling utama sebenarnya adalah individu. Hal ini dikarenakan individu merupakan penyebab semua tindakan yang dilakukan baik itu tindakan perseorangan maupun tindakan kelompok (Saphiro, 2006). Locke dan Hobbes juga setuju dengan keberadaan individu sebagai subjek hak yang paling utama, hal ini dikarenakan individu memiliki sifat rasional sehingga tindakannya pun sudah bisa dipastikan pasti memiliki maksud yang tersembunyi.

Ketidakkampuan individu untuk menerima perbedaan inilah yang menjadi sumber konflik utama. Ironisnya, dalam konteks nasional, belum ada usaha untuk mengelola perbedaan budaya, penghargaan terhadap minoritas pun belum menjadi platform bersama dan tidak jarang kebijakan yang ada justru melanggengkan posisi mayoritas.

Kymlicka (2011) juga mengungkapkan bahwa hal paling mendasar yang harus diakomodasi oleh negara adalah komitmen terhadap kebebasan dan kesetaraan warganya yang dilihat secara perorangan tanpa memandang keanggotaan kelompoknya. Pemikiran ini hadir untuk menggugat

pemikiran feodalisme yang melihat bahwa hak perseorangan akan sangat didasarkan pada keanggotaan mereka pada kelompok tertentu (Kymlicka, 2011). Sejak dulu, hak individu dan hak kelompok ini sudah menjadi bahan perdebatan diantara para ahli. Pendapat terbagi menjadi dua kubu besar yang pertama adalah ahli yang melihat bahwa hak perorangan dan kolektif dipandang sebagai dua isu yang terpisah dan berlawanan. Kedua, ahli yang melihat dua isu sebagai suatu kesatuan. Padahal yang terpenting adalah melihat dua hak ini sebagai sebuah kesatuan karena pasti dalam kelompok mereka akan memperjuangkan dua hak ini.

Terkait dengan 2 hak ini, tak jarang kelompok yang ada di masyarakat mengajukan tuntutan akan dua hal yaitu tuntutan suatu kelompok terhadap anggotanya sendiri dan kedua, tuntutan terhadap masyarakat yang lebih besar (Kymlicka, 2011). Tuntutan yang pertama terkait dengan perlindungan kelompok dari dampak yang menggoyahkan kelompok tersebut akibat perbedaan pendapat internal sedangkan yang tuntutan yang kedua terkait dengan perlindungan kelompok dari dampak keputusan eksternal masyarakat.

Kedua tuntutan ini mereka definisikan sebagai hak kolektif. Dan tidak jarang mereka menggunakan kekuasaan negara untuk membatasi kebebasan kelompoknya sendiri atas nama solidaritas kelompok. Padahal dua tuntutan ini berada di dalam ranah yang berbeda. Pembatasan internal terkait dengan hubungan di dalam kelompok dan perlindungan eksternal terkait dengan hubungan antar kelompok. Kedua macam tuntutan ini diyakini Kymlicka kadang tidak perlu diajukan secara bersamaan. Ada kelompok etnis yang mengupayakan perlindungan eksternal terhadap masyarakat luas tanpa memaksakan pembatasan internal pada anggota kelompoknya. Atau ada pula kelompok lain yang tidak menuntut perlindungan eksternal dari kelompok lain tetapi mencari kekuasaan atas anggotanya sendiri.

Tapi Kymlicka kemudian menemukan fakta di beberapa negara bahwa hak kolektif tidak begitu membantu dalam menganalisa multikulturalisme karena hak kolektif gagal membedakan pembatasan internal dari perlindungan eksternal. Oleh karena itu Kymlicka kemudian lebih berfokus pada pengakomodasian hak perorangan. Hal ini diperkuat dengan paham individualisme yang dikutipnya bahwa secara moral perorangan ada sebelum komunitas, jika individu tidak merasa perlu lagi untuk mempertahankan praktik budaya yang ada, maka komunitas juga tidak lagi memiliki kepentingan untuk melestarikan budaya tersebut.

c) Agama dan Multikulturalisme

Fenomena konflik antar pemeluk agama ini sebenarnya berangkat dari munculnya agama di ruang publik disebut beberapa ahli sebagai mengerasnya fundamentalisme, radikalisme umat beragama, mengentalnya identitas agama ataupun menguatnya politik identitas. Melihat agama sebagai bagian dari politik identitas sebenarnya masih mengundang perdebatan. Hal ini dikarenakan 2 alasan, yang pertama adalah agama tidak boleh dijadikan sebagai identitas karena nantinya akan digunakan dasar klaim dalam membedakan satu orang dengan orang yang lain. Kedua, agama dianggap sebagai pandangan hidup yang membedakannya dengan identitas. Namun saat agama dipandang sebagai identitas maka perlu ada perbedaan pola pikir dimana agama tidak dipandang sebagai mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang buruk tetapi melihat pada mereka yang mengidentifikasi diri pada agama tertentu (aktor). Sedangkan fundamentalisme sendiri didefinisikan sebagai penegasan identitas keagamaan secara total melintasi sektor – sektor kehidupan lain dan tak mau terkungkung dalam kotaknya sendiri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan paham sekulerisme dimana adanya pemisahan antara agama dan ruang publik sehingga agama tidak berperan efektif di dalam ruang publik (Bagir dan Dwipayana, 2011). Kebangkitan agama ini menandai adanya perubahan paradigma yang diyakini. Ketika agama mulai memerankan perannya di ruang publik sebenarnya tidak selalu memunculkan konflik. Hal ini dikarenakan ada pembagian domain keagamaan yang jelas diantara agama tersebut. Tetapi konflik akan muncul saat keseimbangan itu diusik, saat tidak jelas siapa mendominasi siapa, saat mayoritas mulai

memaksakan keyakinan yang mereka yakini ke minoritas, ataupun saat keberagaman dianggap sebagai sesuatu yang 'kafir' oleh karena itu maka yang melenceng itu harus diluruskan. Padahal sebenarnya inti konsep citizenship 'kewargaan' sendiri adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara dan identitas sebagai warga negara itu menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya termasuk identitas keagamaan (Bagir, 2011).

Dengan kata lain pemeluk agama minoritas haruslah diperlakukan sama dengan pemeluk agama mayoritas dan tidak ada pengecualian untuk itu. Identitas keagamaan menjadi sesuatu yang kecil yang seharusnya tidak perlu diperebutkan dengan karena ada identitas lain yang bentuknya lebih luas yang mampu menampung semua orang diatas perbedaan agama ini, misalnya identitas mengenai kebangsaan. Identitas bangsa Indonesia haruslah posisinya berada di atas dari identitas keagamaan. Inilah yang terjadi pada contoh kasus diatas. Pemeluk agama kristen maupun penganut aliran Sapto Dharmo harus dilihat sebagai warga negara Indonesia yang haruslah dilindungi kebebasan untuk beragama dan memeluk keyakinan. Bukanlah mereka yang 'menyimpang' karena tidak memeluk agama mayoritas.

Ada tiga point penting yang dapat dilakukan untuk mendorong multikulturalisme ini (Bagir, 2011). Pertama adalah rekognisi. Rekognisi adalah pengakuan dan penghargaan pada yang berbeda. Dalam tatanan kehidupan sehari – hari, rekognisi ini dapat terlihat dari sejauh mana entitas yang ada di masyarakat mengakui perbedaan dan keberagaman. Pengakuan ini kemudian tidak lantas membiarkan otherness hidup sendiri setelah mengakui mereka tetapi juga menghargai keberadaan kelompok ini di dalam relasi antar kelompok. Sedangkan di tataran nasional, rekognisi dapat dilihat pada sejauh mana negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) mampu mengeluarkan kebijakan yang memberikan jaminan akan pengakuan keberagaman di masyarakat dan penghormatan pada hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya yang melekat pada kelompok tersebut. Kebijakan yang mengakomodasi perbedaan ini menjadi penting karena kebijakan yang bersifat menyeragamkan dan diskriminatif adalah salah satu bentuk penghancuran eksistensi kelompok minoritas.

Poin kedua adalah representasi. Representasi merupakan kehadiran warga negara di dalam ruang publik terkait dengan aspirasi yang mereka bawa. Representasi ini sudah tentu menuntut adanya partisipasi menyeluruh pada seluruh warga negara karena mereka membawa kepentingan mereka sendiri. Selama ini representasi dimaknai sebagai perwakilan dan mereka yang duduk di lembaga perwakilan formal. Padahal sebenarnya representasi ini dapat dimaknai beragam tidak hanya di ranah formal saja tetapi juga di ranah informal. Bentuk – bentuk representasi dibagi ke dalam beberapa bentuk (Pitkin, 1967). Pertama adalah representasi formalistik, dimana perwakilan dimakna di dalam dua dimensi yaitu otoritas dan akuntabilitas. Otoritas terkait dengan otorisasi apa saja yang diberikan kepada wakil. Jadi ketika wakil melakukan tugas – tugas yang diluar otoritasnya, maka dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan. Sedangkan dimensi akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban dari wakil kepada pemberi mandat tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kedua, representasi deskriptif, dimana wakil berasal dari kelompok yang diwakilkan (standing for). Wakil ini merefleksikan kelompok – kelompok yang ada di masyarakat tetapi seringkali tidak secara inheren melakukan sesuatu kepentingan orang yang diwakilinya. Ketiga, representasi simbolik dimana wakil membawa simbol – simbol dari kelompok yang diwakilkan seperti misalnya kultur, kepercayaan, identifikasi, dll. Wakil yang dianggap baik adalah wakil yang mampu diterima sebagai bagian dari yang diwakilinya. Keempat, adalah representasi substantif dimana wakil berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang – orang yang diwakilkan. Wakil membawa kepentingan tertentu yang kemudian direpresentasikan di dalam ruang publik. Representasi ini kemudian akan terkait dengan sejauh mana kelompok – kelompok yang ada di masyarakat baik mayoritas maupun minoritas mampu merepresentasikan gagasan dan kepentingan mereka di dalam ruang publik.

Ketiga, adalah redistribusi. Redistribusi ini menuntut peran aktif lebih besar dari negara. Karena negaralah yang akan memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan akan terdistribusi secara adil kepada seluruh pemeluk agama. Dan negara juga harus dipastikan memiliki mekanisme peran aktif masyarakat jika negara gagal dalam menjalankan fungsi redistribusi ini.

KESIMPULAN

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok budaya, agama, adat, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Di Indonesia, multikulturalisme menjadi bagian dari identitas bangsa yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, kehidupan masyarakat multikultural memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik antar kelompok.

Keberagaman dalam masyarakat multikultural mencakup aspek etnis, budaya, agama, dan sistem nilai. Meski keberagaman ini memperkaya budaya nasional, potensi konflik tetap ada jika tidak dikelola dengan toleransi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan kebijakan publik yang inklusif. Konflik yang terjadi sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan dalam pengakuan hak individu dan kelompok, dominasi mayoritas atas minoritas, serta kurangnya pemahaman terhadap perbedaan.

Agama menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika multikulturalisme. Konflik keagamaan sering kali muncul akibat fundamentalisme, politisasi identitas agama, dan kurangnya kesadaran akan konsep kewarganegaraan yang menjunjung kesetaraan. Oleh karena itu, identitas keagamaan harus diletakkan di bawah identitas kebangsaan untuk menjaga persatuan.

Untuk memperkuat multikulturalisme, diperlukan tiga pendekatan:

1. Rekognisi : Mengakui dan menghargai keberagaman melalui kebijakan yang inklusif dan melindungi hak-hak kelompok minoritas.
2. Representasi : Memberikan ruang bagi seluruh kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, untuk menyuarakan aspirasi mereka di ranah formal maupun informal.
3. Redistribusi : Negara harus memastikan distribusi pembangunan yang adil dan mekanisme partisipasi masyarakat jika terjadi kegagalan redistribusi.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan konflik dapat diminimalisasi, toleransi antar kelompok meningkat, dan masyarakat multikultural yang harmonis dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 84–90.
<https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/127/35>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B. & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi Di Indonesia Untuk Menjadi TokohPahlawan Daerah Dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 224–240.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023b). Kajian Integrasi Nasional Dalam NKRI Tidak Dapat Diubah Dan Sumpah Pemuda Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 270–283.
- Bagir, Zainal Abidin (2011). *Pluralisme Kewargaan : Dari Teologi ke Politik, dalam Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung : Penerbit Mizan
- Dwipayana, AAGN Ari (2011). *Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan : Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis, dalam Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung : Penerbit Mizan
- Kymlicka, Will (2011). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta : Penerbit LP3ES

- Machasin, dkk (2005). Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mutaghfiroh, Rahayu (2011). Akomodasi Transformatif : Tawaran atas Pengelolaan Keragaman dan Hak Perempuan, dalam Pluralisme Kewargaan : Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia. Bandung : Penerbit Mizan
- Nurkhoiron, M; Noorsalim, Mashudi dan Al-Makassary, Ridwan (2007). Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Jakarta : Yayasan TIFA